
ALASAN AMERIKA KEMBALI KE *PARIS CLIMATE AGREEMENT* PADA TAHUN 2021

Putri Khairani Febrisari¹
NIM. 1602045016

Abstract: *This study aims to explain the reasons for United States return to Paris Climate Agreement in 2021. When Donald Trump became president of United States in 2017, announces that United States will withdraw from Paris Climate Agreement. Paris Climate Agreement considered has potential to damage the country's economy and United States will get an economic losses if stay with Paris Climate Agreement. Until 2020, the US officially leaves the Paris Climate Agreement. But in 2021, US declared itself to return the Paris Climate Agreement, even though the United States previously said it could harm the economy. Then it raised a question, why the US decided return to the Paris Climate Agreement in 2021. The theory used in this thesis are decision making theory by William D Coplin, and theory the influence model of decision making process by Andrew Heywood. The results show there are several things can influence the United States decision to return Paris Climate Agreement. First, based on the international context can affect domestic political conditions, like changing leaders and political direction of the country be more focus for fix the climate crisis problem. Second, based on US economic conditions, from fossil energy economic activities to achieve a clean economy and sustainable.. Third, based on the influence of climate scientists and environmental groups, global investor groups, CEO, and some US companies.*

Keywords: *Decision Making, Paris Climate Agreement 2021, United States*

Pendahuluan

Permasalahan lingkungan hidup merupakan salah satu permasalahan yang menjadi agenda pembahasan utama dalam hubungan antar negara. Negara di dunia telah menyadari bahwa kualitas lingkungan hidup memiliki peran penting karena dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan manusia, baik secara langsung atau dimasa depan. Isu lingkungan yang menjadi perhatian utama di dunia yaitu pemanasan global dan perubahan iklim. Kedua permasalahan ini dianggap sebagai ancaman bagi kelangsungan hidup manusia sehingga negara di dunia melakukan berbagai kerjasama dan berupaya membuat perjanjian internasional. Tujuannya untuk mengurangi laju pemanasan global serta perubahan iklim, salah satunya adalah *Paris Climate Agreement*.

Paris Climate Agreement merupakan perjanjian internasional yang berperan sebagai pedoman negara dalam upaya mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global. Perjanjian iklim ini berlaku secara universal bagi seluruh negara dan bersifat mengikat secara hukum. Sebanyak 196 negara UNFCCC yang hadir pada pertemuan COP 21 menyetujui perjanjian tersebut ([United Nation Climate Change, 2015](#)) AS merupakan salah satu negara UNFCCC dikategorikan sebagai negara penghasil emisi gas karbon terbesar ke dua setelah Tiongkok ([Katadata.co.id, 2016](#)).

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : putrihairani140298@gmail.com

Emisi gas karbon yang dihasilkan oleh AS cukup besar yaitu sebanyak 17,8% ([Climate Analytics.Org 2016](#)). Sebagian besar emisi gas karbon yang dihasilkan disebabkan oleh pembakaran dari energi fosil, sehingga rata-rata emisi gas karbon yang dihasilkan AS dari penggunaan energi fosil terhitung 5 miliar ton per tahun mulai dari tahun 2010-2016 ([Ritchie dan Roser 2020](#)). Apabila emisi gas karbon yang dihasilkan semakin meningkat, maka akan berpengaruh pada perubahan iklim.

AS melakukan berbagai macam upaya untuk mengurangi emisi gas karbon, termasuk ikut terlibat pada *Paris Climate Agreement* pada tahun 2016 berdasarkan kewenangan eksekutif Obama ([United Nation Treaty Collection](#)). Pada tahun 2017, upaya AS dalam menekan laju perubahan iklim tidak dilanjutkan, termasuk keterlibatan AS dalam *Paris Climate Agreement*. Pada tahun 2017 pada saat AS dipimpin oleh Donald Trummpp, AS mengumumkan kepada publik untuk menarik diri keluar dari perjanjian iklim tersebut ([The White House, 2017](#)). *Paris Climate Agreement* dinilai dapat merugikan AS dalam bidang ekonomi, dapat menghilangkan banyak pekerjaan bidang energi, serta dapat menghambat kegiatan industri energi fosil manufaktur ([Little India.com, 2018](#)). AS kemudian merealisasikan rencana penarikan diri dari perjanjian iklim tersebut secara resmi pada tanggal 4 November 2020 ([McGrath, 2020](#)).

Sejak pengumuman AS menarik diri dari *Paris Climate Agreement* hingga secara resmi keluar pada perjanjian tersebut, AS dibawah pemerintahan Donald Trump memilih untuk mewujudkan program *America First Energy Plan* (AFEP). Tujuannya untuk menciptakan AS menjadi negara yang mandiri dan aman terhadap energi dengan lebih fokus terhadap pemanfaatan sumber daya bahan bakar fosil ([Enerdata.net, 2021](#)). Selain itu, AS juga memiliki tujuan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan terutama bidang energi melalui proyek pembangunan pengoperasian Pipa *Keystone XL* ([The White House, 2017](#)).

Melalui program AFEP yang lebih fokus terhadap pemanfaatan energi fosil, AS mengalami keuntungan yaitu meningkatnya PDB AS. meningkatnya PDB AS didukung karena adanya kenaikan produksi bahan bakar fosil, meningkatnya jumlah ekspor energi seperti gas alam dan ekspor batubara karena adanya pengaruh dari program AFEP yang memfokuskan kegiatan ekonominya terhadap pemanfaatan energi fosil. Pada tahun 2016, PDB AS berada pada angka \$18,70 triliun USD, kemudian pada tahun 2017 ketika program AFEP berlangsung, AS mengalami kenaikan PDB. Pada tahun 2017 PDB AS berada pada angka 19,48 triliun USD hingga tahun 2019 AS mendapatkan PDB tertinggi yaitu sebanyak 21,37 triliun USD. ([The World Bank, \(current US\\$\) - United States](#)).

Secara garis besar, AS dapat dikatakan sedang berada di kondisi mendapatkan keuntungan ekonomi, salah satunya terjadi peningkatan PDB karena berlangsung program AFEP dengan tidak terlibatnya AS dengan *Paris Climate Agreement*. Pada kenyataannya tahun 2021, AS mengambil keputusan untuk kembali terlibat dengan *Paris Climate Agreement* ([Shofihara & Gewati, 2021](#)) Untuk mendukung upaya kembali terlibat dengan perjanjian iklim tersebut, AS melakukan beberapa keputusan seperti membatalkan proyek pipa keystone XL. Selain itu AS juga memutuskan untuk mengurangi produksi energi fosil dan menggantinya dengan energi ramah lingkungan sebagai upaya mengurangi emisi gas karbon. Resiko yang didapat AS ketika melakukan upaya pengurangan produksi energi fosil yaitu hilangnya lapangan pekerjaan dan

mengalami penurunan PDB dimana sektor industri energi fosil cukup tinggi dalam menyumbang pendapatan AS, dan dikhawatirkan akan mengganggu keamanan energi karena harus melakukan impor minyak dibandingkan dengan produksi energi dalam negeri apabila AS memutuskan untuk kembali ke perjanjian tersebut (Ummah, 2021).

Kerangka Teori

Teori Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan (*Decision Making*) menurut William D. Coplin, dalam mengambil sebuah keputusan yang memiliki kaitan dengan politik luar negeri, ada beberapa determinan yang dipertimbangkan seperti konteks internasional, perilaku para pengambil keputusan luar negeri, politik dalam negeri, serta pengaruh kondisi ekonomi dan militer dalam merumuskan politik luar negeri (Coplin & Marbun, 1992)

A. Konteks internasional

Konteks internasional menjadi determinan utama yang dipertimbangkan ketika suatu negara membuat kebijakan luar negeri, karena perilaku negara sebagian besar ditentukan pada konteks internasional. Konteks internasional menjelaskan tentang bagaimana negara memosisikan diri dalam membuat kebijakan ketika ada pengaruh dari kejadian luar negeri, kemudian negara tersebut membuat kebijakan yang akan mempengaruhi kembali kejadian di luar negeri. Ada tiga elemen terkait dengan konteks internasional yang dapat mempengaruhi politik luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis, dan politis.

B. Pengambil keputusan (*decision maker*)

Pengambil keputusan (*decision maker*) memiliki pengaruh besar terhadap keputusan luar negeri karena dapat mempengaruhi arah tindakan politik luar negeri. Pengambil keputusan berperan sebagai aktor untuk menentukan arah tindakan politik luar negeri yang diambil. Setelah itu, tindakan politik luar negeri yang diambil akan memengaruhi kembali konteks internasionalnya.

C. Kondisi politik dalam negeri

Kondisi politik dalam negeri dinilai memiliki pengaruh besar terhadap keputusan yang dibuat karena berpatokan dengan pola kehidupan negara dan memiliki pengaruh terhadap interaksi internasionalnya. Kondisi politik dalam negeri berupa undang-undang, ideologi, situasi iklim politik, dan pergantian pemimpin. Pergantian orang yang menduduki peran pengambil keputusan politik luar negeri seperti pergantian pemimpin dapat menimbulkan perubahan kebijakan secara menyeluruh dan mendasar.

D. Kondisi ekonomi dan militer.

Kondisi ekonomi dan militer memiliki peran dalam proses penyusunan politik luar negeri, yaitu sebagai pemberi dukungan dan tuntutan terhadap para pengambil keputusan luar negeri.

Model yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan

Dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, Andrew Heywood mengatakan ada empat model yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, yaitu *Rational actor models*, *Incremental models*, *Bureaucratic organization models*, dan *Cognitive processes and believe system models*. (Heywood, 2011)

A. *Rational actor models*

Rational actor models membuat keputusan berdasarkan analisis teori ekonomi, dan lebih mengejar kepentingan yang memiliki daya guna yang tinggi serta kepuasan materiil. Prosedur pembuatan kebijakan oleh model ini berdasarkan sifat masalah yang diidentifikasi, tujuan atau sasaran berdasarkan urutan kecenderungan individu pembuat keputusan, sarana yang tersedia dalam mencapai tujuan dilihat dari efektivitas, keutamaan, dan biaya, serta melalui pemilihan cara yang paling aman untuk hasil akhir yang ingin dicapai secara maksimal. *Rational actor models* mencerminkan bagaimana keyakinan seseorang dalam membuat keputusan sehingga para aktor pembuat keputusan cenderung bertindak berdasarkan hasil pemikiran dan pertimbangan yang matang.

B. *Incremental models*

Incremental models sering dikatakan sebagai model alternatif lain dari *Rational actor models* karena pengambilan keputusan yang bersifat dan mendesak dan tidak berdasarkan hasil pemikiran yang matang, disebabkan oleh tidak adanya dukungan informasi yang menunjang sebagai dasar untuk membuat keputusan.

C. *Bureaucratic organization models*.

Bureaucratic organization models terdiri dari 2 bagian, pertama model organisasi yang merupakan keputusan yang diambil berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan politik yang terjadi secara turun temurun di negara tersebut. Sedangkan birokratik model merupakan keputusan tersebut diambil karena adanya diskusi yang terjadi antar lembaga.

D. *Cognitive process and believe system models*

Cognitive process and believe system models merupakan pengambilan keputusan berdasarkan persepsi kelompok tertentu terhadap apa yang dilihat, dipahami dan dinilai mengenai suatu konsep. Para pembuat keputusan berdasarkan model ini dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor *ethnocentrism* dan faktor *groupthink*. Faktor pertama yaitu *ethnocentrism*, merupakan suatu tindakan atau tujuan tertentu suatu kelompok atau individu dipahami melalui penerapan nilai yang diamati dari pengalaman dan kebudayaan pengambil keputusan hingga pada akhirnya keputusan tersebut dibuat. Faktor kedua yaitu *groupthink* merupakan sebuah faktor dimana kelompok intelektual dan kelompok profesional bekerja sama untuk mendorong para aktor pembuat keputusan untuk mengambil sebuah keputusan yang dapat disepakati bersama

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dimana dalam penelitian ini dijelaskan mengenai alasan AS kembali ke *Paris Climate Agreement*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari jurnal penelitian, buku dan berita-berita dari media cetak, media elektronik resmi dan terpercaya yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan kasus yang berangkat dari hal umum dan memiliki kawasan yang luas menuju hal yang bersifat khusus serta spesifik layaknya piramida terbalik.

Hasil dan Pembahasan

Paris Climate Agreement merupakan salah satu bentuk dari perjanjian internasional yang berbicara mengenai lingkungan hidup dan perubahan iklim. Perjanjian tersebut terbentuk melalui beberapa proses pertemuan dan juga upaya negosiasi dari berbagai negara. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan kesepakatan dalam pencegahan peningkatan suhu bumi tidak lebih dari 2°C dan diupayakan tetap berada di bawah 1,5°C. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan bumi dari bahaya yang terjadi akibat adanya perubahan iklim ([United Nation Climate Change, 2016](#)). Sebanyak 196 negara anggota UNFCCC telah menyetujui terhadap perjanjian iklim tersebut termasuk AS. Pada masa pemerintahan Barrack Obama, AS turut menyetujui dan juga menjadi negara anggota *Paris Climate Agreement*. Pada masa pemerintahan Donald Trump, tahun 2017 AS mengumumkan kepada publik bahwa akan menarik diri dari perjanjian tersebut karena dianggap merugikan negaranya. AS secara resmi keluar dari perjanjian iklim paris tersebut pada tahun 2020. Pada tahun 2021, AS memutuskan untuk kembali bergabung dengan *Paris Climate Agreement* setelah menyatakan diri secara resmi keluar dari perjanjian tersebut. Hal-hal yang mempengaruhi pertimbangan AS untuk kembali bergabung dengan perjanjian iklim Paris tersebut adalah

1. Berdasarkan pengaruh dari konteks internasional

Konteks internasional mempunyai peran besar dalam menentukan politik luar negeri. Konteks internasional merupakan suatu acuan penerapan terhadap tindakan politik luar negeri dan dikukuhkan oleh seluruh negara pada masa lampau, sekarang, dan masa akan datang yang mungkin akan terjadi dan diantisipasi. *Paris Climate Agreement* diasumsikan sebagai konteks internasional karena merupakan suatu perjanjian yang menggambarkan sebuah komitmen bersama dengan negara-negara di dunia dalam hal pembatasan kenaikan suhu bumi. Tujuannya untuk melindungi bumi dari *global warming*. Melalui *Paris Climate Agreement*, perilaku negara untuk mencegah kenaikan suhu bumi baik itu negara *Annex 1* dan *negara Non Annex 1* diwajibkan untuk terlibat dalam perjanjian tersebut dan merupakan bentuk antisipasi agar tidak terjadi kenaikan suhu bumi yang dapat menyebabkan *global warming*.

Pada konteks internasional terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi suatu negara dalam merumuskan suatu kebijakan luar negeri yaitu elemen geografis, ekonomis, dan politis. Pada *Paris Climate Agreement* terdapat elemen ekonomis dan elemen politis yang mempengaruhi para pengambil keputusan. Berdasarkan elemen ekonomis, negara-negara berkembang saling ketergantungan dengan negara maju terutama terhadap pembiayaan dan juga upaya mitigasi terhadap perubahan iklim. AS sebagai negara ekonomi maju ditandai dengan pendapatan GDP nya lebih dari \$1 triliun dollar USD berdasarkan catatan *World Bank*. AS memiliki tanggung jawab kepada negara anggota UNFCCC lainnya dalam mendukung upaya menekan laju perubahan iklim. Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi AS untuk kembali ke perjanjian iklim tersebut dan AS juga berupaya untuk kembali menjalankan kewajiban yang telah disepakati dalam *Paris Climate Agreement* berupa pemberian dana hibah iklim sebanyak \$100 miliar dollar USD kepada UNFCCC sebagai bentuk dukungan kepada negara berkembang yang termasuk sebagai negara anggota UNFCCC dalam mencapai target pengurangan emisi ([DW.com 2022](#)).

Selain elemen ekonomis, elemen politis juga mempengaruhi pertimbangan AS untuk kembali ke *Paris Climate Agreement* karena AS ingin memperbaiki kredibilitasnya sebagai negara pemimpin dalam tata politik lingkungan. Selama tahun 2017-2020 AS absen dari komunitas iklim global dan juga upaya internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Peran AS dalam perjanjian iklim sangat penting. AS dianggap sebagai negara yang mampu mempertahankan hegemoninya dalam dinamika internasional, baik secara langsung atau tidak langsung terhadap negara lain. Banyak negara yang menjadikan AS sebagai isyarat dari kebijakan terutama pada isu krisis iklim. Keterlibatan AS dalam *Paris Climate Agreement* dibutuhkan oleh dunia internasional untuk membantu menyelesaikan permasalahan iklim global dan menjadikan AS sebagai aktor utama yang bertanggung jawab terhadap permasalahan tersebut. Dunia internasional menilai jika AS tidak ikut terlibat dalam perjanjian iklim Paris akan sulit untuk mewujudkan upaya mempertahankan temperature bumi sesuai dengan target yang disepakati. Melalui pertimbangan ini, AS berusaha untuk memperbaiki kembali kredibilitasnya di panggung dunia sebagai negara pemimpin dalam upaya menekan laju perubahan iklim. (McGrath, 2017)

2. Berdasarkan situasi politik dalam negeri

Situasi politik dalam negeri dapat mempengaruhi dalam pertimbangan suatu kebijakan. Situasi politik yang dimaksud berupa terjadinya pergantian pemimpin. Terjadinya pergantian pemimpin dapat memberikan perubahan kebijakan secara menyeluruh karena terdapat perbedaan pandangan dan perbedaan orientasi kepemimpinan. Setelah adanya pergantian pemimpin AS dari pemerintahan Donald Trump menjadi Joe Biden dan secara resmi dilantik sebagai presiden terpilih, Joe Biden mempertimbangkan situasi kondisi politik dalam negeri sebelumnya mengenai keterlibatan AS terhadap rezim lingkungan. AS sudah pernah terlibat dengan rezim lingkungan global ketika berada pada masa pemerintahan presiden Nixon. AS merupakan negara pertama yang membuat undang-undang mengenai perlindungan lapisan ozon, pelestarian spesies langka dan satwa liar serta beberapa aspek perlindungan lainnya (McGrath, 2021). Sehingga dengan kembali ke *Paris Climate Agreement* sebagai bentuk upaya AS untuk siap kembali memimpin dunia dan berjanji untuk bekerja sama dengan banyak negara untuk memperbaiki permasalahan perubahan iklim dan lebih berupaya untuk mengatasi permasalahan krisis iklim akibat dari pemanasan global (Fadhil 2020).

3. Berdasarkan pengaruh dari kondisi ekonomi domestik

Kondisi ekonomi dan militer mempengaruhi pembuat kebijakan untuk memutuskan kebijakan luar negeri. Berdasarkan permasalahan penelitian, kondisi ekonomi lebih tepat dalam mempengaruhi pembuat kebijakan. Pada masa pemerintahan Donald Trump, AS mengalami peningkatan ekonomi yang cukup menguntungkan akibat dari berjalannya program kebijakan AFEP selama tahun 2017-2020.

Seiring dengan terjadinya peningkatan ekonomi, emisi gas karbon yang dihasilkan AS juga ikut mengalami peningkatan karena pada program AFEP cenderung fokus terhadap eksploitasi dan penggunaan energi fosil seperti minyak bumi, gas alam, serta batubara. Peningkatan emisi gas karbon tersebut digambarkan melalui tabel di bawah ini

Tabel 1. Jumlah Produksi Emisi Gas Karbon AS 2017-2020

Tahun	Emisi CO2 berdasarkan jenis bahan bakar		
	Minyak	Gas	Batubara
2017	2,27 miliar Ton CO2	1,48 miliar Ton CO2	1,34 miliar Ton CO2
2018	2,32 miliar Ton CO2	1,64 miliar Ton CO2	1,28 miliar Ton CO2
2019	2,31 miliar Ton CO2	1,69 miliar Ton CO2	1,10 miliar Ton CO2
2020	2,02 miliar Ton CO2	1,65 miliar Ton CO2	888,65 juta Ton CO2

Sumber: <https://ourworldindata.org/emissions-by-fuel>

Akibat dari adanya peningkatan emisi tersebut, pada tahun 2017 hingga tahun 2020, ada sekitar 69 peristiwa bencana alam yang melanda AS disebabkan oleh perubahan iklim yaitu kekeringan, banjir, cuaca dingin yang ekstrem, badai ekstrem, badai tropis, kebakaran hutan (yang dipicu oleh kekeringan) dan badai musim dingin. Dari badai tersebut yang melanda AS dapat menyebabkan kerugian hingga \$635,8 miliar dollar AS (National Center for Environmental Information, 2022). Pertimbangan AS kembali ke *Paris Climate Agreement* dilakukan untuk memastikan AS mencapai ekonomi bersih secara 100% dan juga ingin mencapai *Net Zero Emission 2050* yang juga merupakan bagian dari agenda *Paris Climate Agreement*. Untuk mencapai *Net Zero Emission 2050* tersebut, fokus utama Biden yaitu melakukan pengurangan emisi karbon dari pembakaran minyak, gas dan batubara dan ingin mengganti 80% penggunaan energi AS dengan energi alternatif (Milman 2021)

4. Berdasarkan pengaruh dari *Cognitive Process and Beliefs System Models*

Selain tiga faktor yang dapat mempengaruhi keputusan AS untuk kembali ke *Paris Climate Agreement* yaitu konteks internasional, situasi politik dalam negeri dan kondisi ekonomi domestik suatu negara, Keputusan AS untuk Kembali ke *Paris Climate Agreement* juga dipengaruhi oleh beberapa model kelompok tertentu yang menjadi bahan pertimbangan oleh aktor pembuat keputusan. Joe Biden yang berperan sebagai presiden pengganti Donald Trump sekaligus sebagai aktor pembuat keputusan mempertimbangkan beberapa hal yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan permasalahan penelitian yaitu mengenai proses pengambilan keputusan untuk kembali ke *Paris Climate Agreement*. AS mengalami pengaruh dari *cognitive process and beliefs system* dengan faktor *groupthink*. Pada proses perumusan kebijakan, Joe Biden sebagai aktor pengambil keputusan mempertimbangkan dari beberapa persepsi kelompok tertentu, seperti kelompok intelektual dan kelompok profesional mengenai apa yang dilihat, dan dipahami dari nilai suatu konsep kebijakan.

Kelompok intelektual yang dimaksud yaitu kelompok ilmuwan iklim dan juga pakar sains serta kelompok pemerhati lingkungan. Sebelum memutuskan untuk kembali ke *Paris Climate Agreement*, Joe Biden mendengarkan pendapat dan juga laporan yang disampaikan oleh para ahli iklim melalui hasil riset mengenai bencana yang melanda

dunia dan juga melanda AS sebagai akibat dari adanya perubahan iklim melalui situs yang dikelola bersama oleh Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat serta laporan mengenai kerugian yang telah didapatkan ketika terjadinya bencana alam tersebut yang melanda dunia akibat dari perubahan iklim dan pemanasan global (Patrick 2020).

Kelompok para ilmuwan iklim menjadi prioritas utama dalam kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri untuk mengatasi ancaman nyata dari adanya pemanasan global (Phys.Org, 2021). Para ilmuwan iklim berpendapat bahwa keputusan Biden diperlukan untuk menghindari konsekuensi bencana dari perubahan iklim. Para ilmuwan iklim telah memperingatkan bahwa bencana yang dipicu perubahan iklim akan terus memburuk dan akan menyebabkan bagian dunia akan menjadi tidak layak huni akibat dari suhu global yang meningkat jika pemerintah gagal dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca karena pengaruh adanya kegiatan pembakaran minyak, gas, dan batubara (Newberger, 2020).

Tidak hanya mempertimbangkan dari kelompok ahli iklim dan pakar sains, Joe Biden juga mendengarkan dan mempertimbangkan beberapa laporan dari kelompok intelektual lain seperti para kelompok pemerhati lingkungan juga turut mempengaruhi keputusan Joe Biden untuk kembali ke *Paris Climate Agreement*. Seperti dewan lingkungan Michigan, kelompok advokasi lingkungan Amerika yaitu *Michigan League of Conservation Voters* yang merupakan kelompok penekan non partai, kemudian kelompok advokasi lingkungan non komersil Chicago yaitu *Environmental Law and Policy Center* mendukung Biden untuk kembali ke *Paris Climate Agreement* (Michigan Environmental Council, 2021).

Kelompok tersebut melaporkan bahwa pemerintah AS sebelumnya hanya mempeburuk krisis iklim dengan cara melakukan pemecatan terhadap ilmuwan iklim dan mengabaikan keadilan lingkungan. Pada saat momentum kampanye AS dalam pemilihan presiden pada tahun 2020, pendapat kelompok pemerhati lingkungan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan juga sebagai upaya memenuhi janji Biden kepada masyarakat untuk membawa kembali AS ke *Paris Climate Agreement* dalam mengatasi krisis iklim yang melanda AS dan juga dunia.

Selain dari laporan dan pendapat kelompok intelektual, kelompok profesional juga mempengaruhi keputusan Biden untuk kembali ke *Paris Climate Agreement*. Kelompok profesional yang dimaksud yaitu kelompok investor global serta kelompok *Chief Executive Officer* (CEO) dan perusahaan terkemuka AS yang sebagian besar memberikan pandangan apabila AS kembali ke *Paris Climate Agreement* kelompok ini akan memberikan dukungan berupa aliran dana tambahan dari investor untuk mewujudkan perekonomian yang ramah lingkungan. Hal ini dinilai cukup menguntungkan bagi AS apabila para investor ikut turut berkontribusi dalam mewujudkan perekonomian yang ramah lingkungan (Reuters, 2020).

Untuk kelompok CEO AS dan perusahaan terkemuka AS yang bergerak di berbagai bidang mendukung agar AS memutuskan untuk kembali ke *Paris Climate Agreement* berupa ajakan kerjasama kepada AS dalam upaya penanggulangan dampak perubahan iklim yang serius dan juga berkelanjutan (Center for Climate and Energy Solutions, 2020). Dalam Hal ini Joe Biden kemudian mempertimbangkan AS agar dapat

memanfaatkan investasi dan inovasi dari perusahaan tersebut untuk mengembangkan teknologi masa depan yang diharapkan lebih ramah lingkungan dan dapat memberikan poensi untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi untuk memperkuat daya saing AS.

Dukungan mengenai kembalinya AS ke *Paris Climate Agreement* juga dilakukan oleh Chevron, Chevron menyatakan dukungan terhadap *Paris Climate Agreement* dan berkomitmen untuk bekerja sama untuk mengatasi perubahan iklim ([Chevron.com, 2021](#)). Chevron mendukung AS untuk bergabung kembali dengan perjanjian iklim Paris dengan bekerja sama menurunkan intensitas karbon ekonomi global dan secara bersama akan membantu AS memajukan ekonomi, serta berusaha melakukan produksi energi yang rendah karbon dibandingkan dengan semua produsen minyak dan gas. Selain itu pihak Chevron berjanji akan melaporkan efisiensi karbon dari produk yang mereka jual dan memberikan solusi inovatif untuk menurunkan intensitas karbon sebagai bentuk dorongan kepada pemerintah AS untuk memutuskan kembali ke perjanjian iklim Paris ([Chevron.com, 2021](#))

Setelah melalui proses pertimbangan dari berbagai situasi yang telah dihadapi oleh AS, kemudian Joe Biden selaku aktor pembuat keputusan dihadapkan dengan dua pilihan alternatif. Pada akhirnya keputusan yang dipilih oleh Joe Biden selaku pemimpin AS dan aktor pembuat keputusan yaitu membawa kembali AS untuk kembali ke *Paris Climate Agreement* untuk melakukan penerapan kebijakan ramah lingkungan serta memulihkan kredibilitas AS dalam mengatasi permasalahan iklim. Keputusan tersebut diwujudkan melalui tindakan politik luar negeri yaitu menandatangani instrumen perintah eksekutif Joe Biden pada tanggal 20 Januari tepatnya pada saat hari pertama Joe Biden menjabat. pada tanggal 19 Februari 2021, AS mengumumkan secara resmi kembali bergabung dengan *Paris Climate Agreement* melalui pernyataan pers bersama Menteri luar negeri AS yaitu Antoni J Blinken ([U.S Departement of States, 2021](#)).

Kesimpulan

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa alasan Amerika Serikat memutuskan untuk kembali ke *Paris Climate Agreement* pada tahun 2021 adalah pertama AS memiliki tanggung jawab terhadap upaya untuk mengatasi permasalahan iklim global karena AS merupakan negara *Annex I* dan juga negara penyumbang emisi gas karbon terbesar di dunia. AS juga merupakan salah satu negara yang kuat secara ekonomi dan bertanggung jawab kepada negara anggota UNFCCC lainnya dalam mendukung upaya mengatasi laju perubahan iklim berupa pemberian dana iklim sebanyak \$100 miliar dollar USD kepada UNFCCC untuk mengatasi target pengurangan emisi. AS juga ingin memperbaiki kredibilitas negaranya sebagai negara pemimpin dalam tata politik lingkungan karena selama tahun 2017-2020 AS absen dari komunitas iklim global dan upaya internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Alasan kedua adalah berdasarkan pengaruh dari situasi politik dalam negeri berupa pergantian pemimpin menyebabkan terjadinya perubahan orientasi kepemimpinan. Sebelumnya berfokus pada upaya pemanfaatan energi fosil dan lebih

mengejar keuntungan ekonomi menjadi fokus untuk memperbaiki permasalahan krisis iklim akibat dari pemanasan global.

Alasan berikutnya yaitu berdasarkan pengaruh kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi ketika AS dipimpin oleh Donald Trump yang fokus terhadap pemanfaatan energi fosil melalui program AFEP, AS juga mengalami peningkatan emisi gas karbon. Kemudian, ketika pemerintahan AS dibawah kepemimpinan Joe Biden, mempertimbangkan membawa AS kembali ke *Paris Climate Agreement* untuk mencegah agar AS tidak mengalami peningkatan emisi gas karbon dengan mewujudkan *Net Zero Emission* agar dapat mencapai ekonomi bersih 100% dan diperkirakan dapat memperkecil kerugian kurang lebih \$637 miliar dollar USD dibandingkan AS harus membayar kerugian berupa kerusakan sebesar \$635,8 miliar dollar AS akibat bencana alam yang telah melanda AS pengaruh dari perubahan iklim dan pemanasan global. Yaitu memfokuskan penggunaan energi alternatif dengan harapan dapat memperkecil kerugian akibat krisis iklim yang melanda AS sebelumnya.

Alasan AS kembali ke *Paris Climate Agreement* juga dipengaruhi oleh beberapa model kelompok tertentu yaitu *cognitieve process and belief system* dengan faktor *groupthink* yaitu berdasarkan pemikiran kelompok intelektual dan kelompok profesional. Kelompok intelektual berupa pendapat para ilmuwan iklim berdasarkan pandangan sains dan juga kelompok dari pemerhati lingkungan. Sedangkan kelompok profesional yaitu berasal dari kelompok investor global, pandangan para *Chief Executive Officer* (CEO) di AS serta beberapa perusahaan terbesar dan terkemuka di AS termasuk dukungan oleh perusahaan Chevron. Kelompok kelompok ini memberikan pandangan dan juga memberikan gambaran peluang keuntungan yang didapatkan oleh AS ketika bergabung kembali dengan *Paris Climate Agreement* serta melakukan ajakan kerjasama untuk membantu AS mengatasi dampak perubahan iklim apabila AS bergabung kembali dengan perjanjian iklim Paris tersebut.

Daftar Pustaka

- Analitics.Org, C. (2016). *Projected Paris Agreement total ratifications in 2016*. Tersedia di <https://climateanalytics.org/briefings/ratification-tracker-projections/>.
- Balch, O. (2019). *75 CEOs call for US to stay in the Paris Agreement as emissions continue to rise*. Tersedia di <https://www.reutersevents.com/sustainability/75-ceos-call-us-stay-paris-agreement-emissions-continue-rise>.
- Center for Climate and Energy Solutions. (2020). *42 Companies Urge Biden, Congress to Work Together on Climate Solutions*. Tersedia di <https://www.c2es.org/press-release/42-companies-urge-biden-congress-to-work-together-on-climate-solutions/>.
- Change, U. N. (2015). *The Paris Agreement*. Tersedia di dari <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>.

- Chevron.com. (2021). *chevron supports well-designed climate policy*. Tersedia di <https://www.chevron.com/sustainability/environment/climate-policy#:~:text=We%20support%20well%2Ddesigned%20climate,work%20to%20advance%20carbon%20footprinting>.
- Coplin, W. D., & Marbun, M. (1992). *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- DW.com. (2022). *Bantuan \$100 Miliar untuk Tangani Perubahan Iklim*. Tersedia di <https://www.dw.com/id/bantuan-100-miliar-dolar-as-untuk-tangani-perubahan-iklim/a-61076638>.
- Enerdata.net. (2021). Tersedia di <https://www.enerdata.net/publications/executive-briefing/biden-fight-against-global-warming.html>.
- Fadhil, I. (2020). *Kebijakan Luar Negeri di Era Joe Biden: America is Back!* Tersedia di <https://www.merdeka.com/dunia/kebijakan-luar-negeri-di-era-joe-biden-america-is-back.html>.
- Green, M., & Kerber, R. (2020). *Global investor group urges United States to rejoin Paris climate accord*. Tersedia di <https://www.reuters.com/article/us-climate-change-usa-investors-idUSKBN27K00D>.
- Heywood, A. (2011). *Global Politics*. United Kingdom: Palgrave Foundation.
- Katadata.co.id. (2016). *Cina dan Amerika, Penghasil Emisi Karbon* Tersedia di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/14/cina-dan-amerika-penghasil-emisi-karbon-terbesar-dunia>.
- Little India.com. (2018). Tersedia di *Trump Blames India, China for His Withdrawal* <https://littleindia.com/trump-blames-india-china-withdrawal-paris-climate-deal/>.
- McGrath, M. (2017). *Makna mundurnya AS dari kesepakatan Paris bagi dunia*. Tersedia di <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40131548>.
- McGrath, M. (2020). *Climate change: US formally withdraws from Paris agreement*. Tersedia di <https://www.bbc.com/news/science-environment-54797743>.
- McGrath, M. (2021). *US rejoins Paris accord: Biden's first act sets tone for ambitious approach*. Tersedia di <https://www.bbc.com/news/science-environment-55732386>.
- Michigan Environmental Council. (2021). *ENVIRONMENTAL GROUPS HAIL U.S. RETURN TO PARIS CLIMATE AGREEMENT*. Tersedia di [environmentalcouncil.org:https://www.environmentalcouncil.org/environmental_groups_hail_u_s_return_to_paris_climate_agreement](https://www.environmentalcouncil.org/environmental_groups_hail_u_s_return_to_paris_climate_agreement).

Milman, O. (2021). *Biden's Clean Energy Plan Would Cut Emissions and Save 317.000 Lives*. Tersedia di The Guardian.com: <https://www.theguardian.com/us-news/2021/jul/11/biden-administration-clean-energy-climate-crisis>.

National Center for Environmental Information. (2022). *Summary Stats*. Tersedia di <https://www.ncei.noaa.gov/access/billions/summary-stats/US/2017-2020>.

Newberger, E. (2020). *CNBC.com*. Tersedia di Joe Biden calls climate change the 'number one issue facing humanity': <https://www.cnbc.com/2020/10/24/joe-biden-climate-change-is-number-one-issue-facing-humanity.html>.

Patrick, J. (2020). *Pemilu AS jadi Kunci Krisis Iklim Dunia*. Tersedia di CNN Indonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201104081410-199-565635/pemilu-as-jadi-kunci-krisis-iklim-dunia>.

Phys.Org. (2021). Tersedia di US officially back in Paris accord, vows climate action: <https://phys.org/news/2021-02-paris-accord-vows-climate-action.html>

Reuters. (2020). *Global investor group urges United States to rejoin Paris climate accord*. Tersedia di [www.reuters.com](https://www.reuters.com/article/us-climate-change-usa-investors-idUSKBN27K00D): <https://www.reuters.com/article/us-climate-change-usa-investors-idUSKBN27K00D>.

Shofihara, I. J., & Gewati, M. (2021). *Baru Dilantik, Biden Langsung Bawa AS Kembali Ikuti Perjanjian Paris*. Tersedia di Kompas.com <https://www.kompas.com/global/read/2021/01/21/190123470/baru-dilantik-biden-langsung-bawa-as-kembali-ikuti-perjanjian-paris?page=all>

The White House. (2017). President Trump Announces U.S. Withdrawal From the Paris Climate Accord tersedia di <https://trumpwhitehouse.archives.gov/articles/president-trump-announces-u-s-withdrawal-paris-climate-accord/>

The World Bank. Tersedia di GDP (current LCU) - United States, tersedia di <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CN?end=2021&locations=US&start=2015>

Ummah, A. (2021). *Nah Loh, Kebijakan Biden Bakal 'Kebiri' Minyak dan Batu Bara*. Tersedia di <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210131123837-17-219956/nah-loh-kebijakan-biden-bakal-kebiri-minyak-dan-batu-bara>